

Bagian Keempat

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19

4.1. Pendahuluan

Bagian ini menyampaikan hasil kajian dengan menggunakan metode AHP untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam mengoptimal potensi pajak dan retribusi daerah Bukittinggi. AHP merupakan suatu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan matematis untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas L Saaty, yang merupakan seorang ahli matematika dari Pittsburg University, Amerika pada tahun 1970an. AHP menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk membuat keputusan yang efektif tentang permasalahan yang bersifat kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Keuntungan dari AHP adalah bahwa metode ini dirancang untuk menangani situasi di mana penilaian subjektif individu merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Output AHP adalah peringkat yang diprioritaskan untuk menunjukkan preferensi keseluruhan untuk setiap alternatif keputusan.

Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap sebagai ekspert atau ahli sebagai input utamanya. Kriteria ahli tidaklah berarti seseorang harus menamatkan pendidikan tinggi tertentu, namun kriteria ahli lebih mengacu kepada orang yang mengerti dan memiliki pemahaman yang baik mengenai permasalahan yang diajukan, merasakan akibat dari permasalahan tersebut, atau mempunyai kepentingan terhadap masalah dimaksud. Membuat keputusan dengan model AHP pada umumnya dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu responden atau lebih dari satu ahli/ekspert. Penggunaan beberapa responden bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat komprehensif mengenai suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang.

Sistem kerja AHP adalah memecah situasi yang bersifat kompleks dan tidak terstruktur menjadi bagian sederhana dalam bentuk komponen kriteria hingga sub kriteria. Tahapan pengujian AHP dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan tujuan yang akan dicapai

2. Menyusun masalah kedalam suatu hirarki yang terdiri dari beberapa kriteria dan sub kriteria
3. Penyusunan prioritas untuk setiap elemen kriteria dan sub kriteria. Pada tahapan ini akan dilakukan proses pembobotan dari kepentingan relatif setiap variabel yang digunakan, sehingga didapatkan akar permasalahan yang prioritas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan di awal.
4. Melakukan pengujian validitas menggunakan uji konsistensi untuk setiap kriteria dan sub kriteria yang diperbandingkan.

Kuesioner AHP memperlihatkan perbandingan berpasangan antara beberapa kriteria dengan pembobotan menggunakan skala relatif Saaty (1-9). Definisi dari penilaian skor dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 : sama penting (*equal*)
- 3 : lebih penting sedikit (*slightly*)
- 5 : lebih penting secara kuat (*strongly*)
- 7 : lebih penting secara sangat kuat (*very strong*)
- 9 : lebih penting secara ekstrim (*extreme*)

Tabel 4.1. Skala Relatif Saaty

Tingkat	Definisi	Keterangan
1	Kedua elemen adalah sama penting	Kedua elemen memiliki pengaruh yang sama
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya	Penilaian sedikit lebih memihak pada salah satu elemen dibanding pasanganya (<i>moderat</i>)
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya	Salah satu elemen sangat berpengaruh dan dominasinya tampak secara nyata
7	Elemen yang satu jelas sangat penting daripada elemen yang lainnya	Bukti bahwa salah satu elemen sangat penting daripada pasangannya adalah sangat jelas
9	Elemen yang satu mutlak sangat penting daripada elemen yang lainnya	Bukti bahwa salah satu elemen sangat penting daripada pasangannya adalah sangat jelas
2,4,6,8	Nilai tengah di antara dua perbandingan yang berdekatan	Nilai ini diberikan jika terdapat keraguan di antara kedua penilaian yang berdekatan
Kebalikannya (<i>reciprocal</i>)	Jika elemen x mempunyai salah satu nilai di atas pada saat dibandingkan dengan elemen y, maka elemen y mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan elemen x	

Sumber: Saaty, 1980.

4.2. Identifikasi Permasalahan Prioritas dalam Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi

Dalam rangka menggali potensi pajak dan retribusi daerah di Bukittinggi maka digunakanlah metode AHP untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang perlu diselesaikan dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi.

4.2.1. Penetapan Tujuan dan Penentuan Kriteria

Pada tahap awal dalam Teknik AHP, dilakukan perumusan kategori tujuan dalam hal ini adalah mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi. Selanjutnya dilakukan penyusunan kriteria permasalahan berdasarkan kajian literatur yang memadai, FGD dengan pihak SKPD dan unsur lain yang relevan. Sehingga teridentifikasi sebanyak 7 permasalahan pada tahap berikutnya dilakukan pembobotan untuk mendapatkan akar permasalahan dapat ditelusuri secara lebih mendalam dan terinci.

Tabel 4.2. Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria Permasalahan dalam mengoptimalkan Potensi Pajak dan Retribusi Kota Bukittinggi

Kriteria		Sub Kriteria
Aspek Kelembagaan	1.	Sistem administrasi pajak yang jelas
	2.	Ketegasan Pemda menindak wajib pajak yang tidak patuh
	3.	Sosialisasi pajak secara masif dengan media digital
	4.	Kredibilitas dan Reputasi Pemerintah Daerah
	5.	Komitmen Pemerintah Daerah
	6.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pajak
Aspek Teknis Pengelolaan Pajak	1.	Perhitungan target dan potensi pajak
	2.	Dasar penetapan potensi pajak
	3.	Database objek dan wajib pajak
	4.	Uji petik secara berkala
Aspek Regulasi	1.	Ketersediaan Perda
	2.	Regulasi Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan
	3.	Regulasi terkait sanksi dan penalti
	4.	Dasar hukum pemeriksaan database wajib pajak
Aspek Sumber Daya Manusia	1.	Ketersediaan Petugas khusus pemeriksa dan penagihan pajak yang memadai
	2.	Kompetensi Petugas khusus pemeriksa dan penagihan pajak
	3.	Insentif petugas pajak
	4.	Komitmen petugas dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan

Aspek Eksternal	1.	Kondisi Politik
	2.	Kondisi Ekonomi
	3.	Kesadaran wajib pajak
	4.	Pungli dan Premanisme
Aspek Infrastruktur	1.	Ketersediaan Infrastruktur (software, teknologi digital, jaringan internet, computer, tapping box, parkir meter)
	2.	Jumlah Infrastruktur yang memadai (software, teknologi digital, jaringan internet, computer, tapping box, parkir meter)
	3.	Ketersediaan Anggaran untuk pengadaan Infrastruktur
	4.	Perawatan Infrastruktur secara berkala
Aspek Elektronifikasi	1.	Ketersediaan Kanal non tunai yang beragam
	2.	Komitmen bersama dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran
	3.	Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
	4.	Ketersediaan tenaga IT untuk mendukung penerimaan pajak non tunai

Sumber: data diolah (2021)

4.2.2. Pengujian Validitas

Bagian terpenting dalam menggunakan AHP adalah pengujian konsistensi. Hal ini disebabkan input utama AHP adalah persepsi manusia yang seringkali bersifat subjektif. Tingkat konsistensi yang rendah akan menyebabkan hasil menjadi tidak valid dan proses pengambilan keputusan menjadi tidak optimal. AHP mengukur tingkat konsistensi secara keseluruhan dengan menggunakan rasio inkonsistensi. Semakin besar nilai rasio yang diperoleh, maka tingkat validitas data akan semakin rendah. Indeks konsistensi tersebut tidaklah harus sempurna, selama dapat menjaga koherensi di antara objek dan kriteria yang digunakan.

Jika indeks inkonsistensi adalah kecil dari 0,1, maka derajat konsistensi adalah memuaskan. Sebaliknya apabila nilai indeks inkonsistensi adalah besar dari 0,1 hal ini berarti bahwa data adalah tidak valid sehingga diperlukan proses konfirmasi untuk meningkatkan konsistensi dan validitas data. Hasil pengujian konsistensi menunjukkan bahwa proses perbandingan berpasangan telah dilakukan secara konsisten dan memenuhi asumsi transitivity. Hal ini berarti pada data adalah valid dan identifikasi permasalahan prioritas telah dilakukan secara rasional dan optimal. Permasalahan yang

prioritas untuk diselesaikan dalam rangka untuk dirumuskan.

mencapai tujuan yang telah



Gambar 4.1 Hasil Pengujian Konsistensi Metode AHP

Priorities with respect to:	Combined
KUISIONER PENELITIAN RISPODAKOTA BUKITTING >Aspek Kelembagaan	
Sosialisasi pajak secara masive dengan media digital	,292
Kredibilitas dan Reputasi Pemerintah Daerah	,189
Komitmen Pemerintah Daerah	,153
Sistem administrasi pajak yang jelas	,139
Keteguhan Perda memisaduk wajib pajak yang tidak	,137
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pajak	,089
Inconsistency = 0,67	
with 0 missing judgments.	

Priorities with respect to:	Combined
KUISIONER PENELITIAN RISPODAKOTA BUKITTING >Aspek Regulasi	
Ketersediaan Perda	,334
Regulasi Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan	,311
Regulasi terkait sanksi dan pidana	,190
Dasar hukum pemeriksaan database wajib pajak	,166
Inconsistency = 0,00577	
with 0 missing judgments.	

Priorities with respect to:	Combined
KUISIONER PENELITIAN RISPODAKOTA BUKITTING >Aspek Eksternal	
Kesadaran wajib pajak	,460
Kondisi Ekonomi	,288
Kondisi Politik	,162
Pungli dan Premanisme	,090
Inconsistency = 0,02	
with 0 missing judgments.	

Priorities with respect to:	Combined
KUISIONER PENELITIAN RISPODAKOTA BUKITTING >Aspek Teknis Pengelolaan Pajak	
Perhitungan target dan potensi pajak	,471
Dasar penetapan potensi pajak	,235
Database objek dan wajib pajak	,169
Uji petik secara berkala	,124
Inconsistency = 0,05	
with 0 missing judgments.	

Priorities with respect to:	Combined
KUISIONER PENELITIAN RISPODAKOTA BUKITTING >Aspek Sumber Daya Manusia	
Kompetensi Petugas khusus pemeriksaan dan penagih	,326
Ketersediaan Petugas khusus pemeriksaan dan penagih	,293
Komitmen petugas dalam melakukan pemeriksaan di	,276
Incentif petugas pajak	,105
Inconsistency = 0,00718	
with 0 missing judgments.	

Priorities with respect to:	Combined
KUISIONER PENELITIAN RISPODAKOTA BUKITTING >Aspek Elektronifikasi	
Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Etd	,438
Ketersediaan Kanal non tunai yang beragam	,246
Ketersediaan tenaga IT untuk mendukung pemerinas	,171
Komitmen bersama dengan Penyedia Jasa Sistem Pe	,145
Inconsistency = 0,04	
with 0 missing judgments.	

Sumber: data diolah (2021)

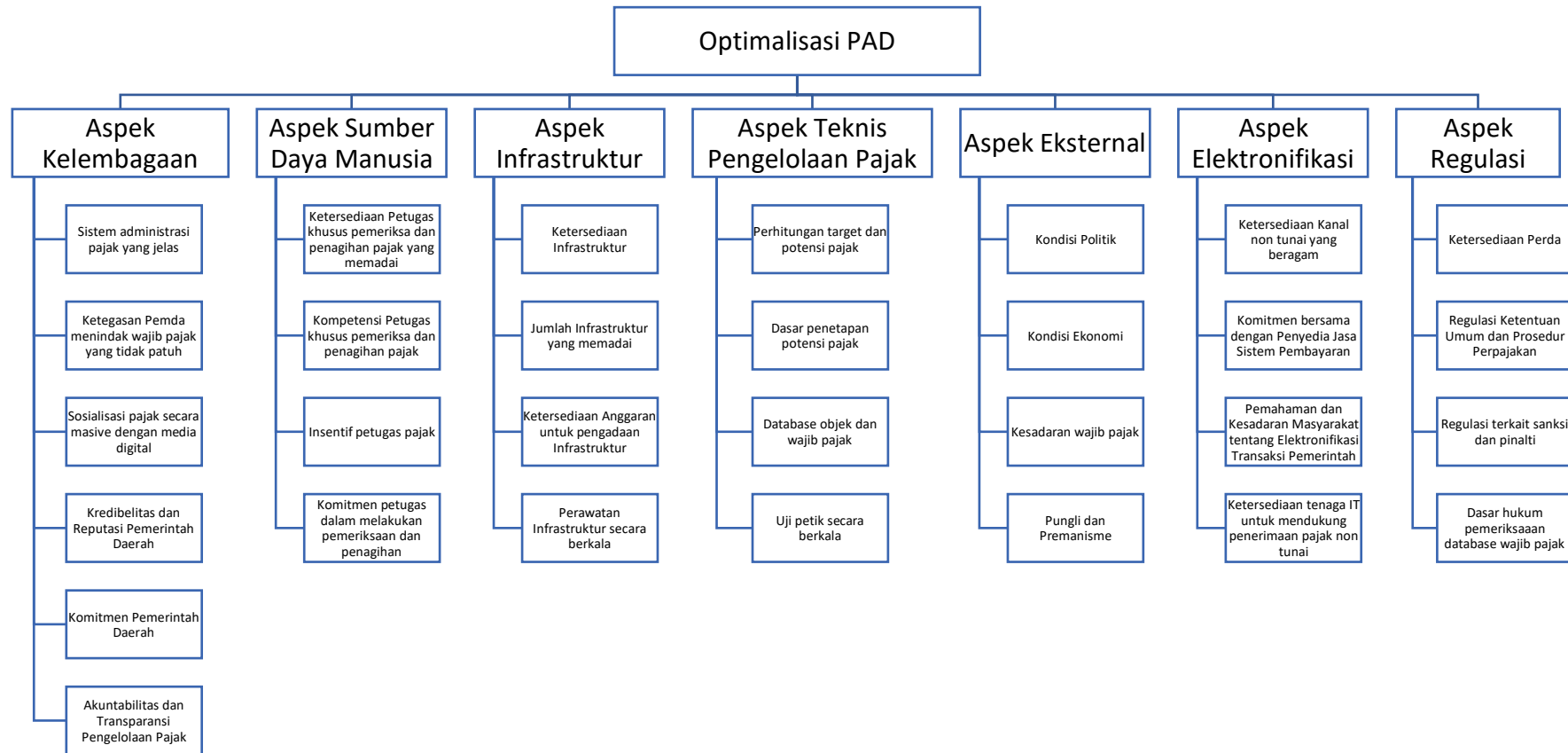
4.2.3. Pembobotan dan Penyusunan Hirarki

Tahapan paling krusial dalam analisis AHP adalah membangun hierarki berdasarkan kepada hasil pembobotan menurut prioritas kriteria dan sub kriteria. Struktur hierarki dari hasil kajian memperlihatkan bahwa permasalahan paling mendasar yang perlu mendapat prioritas utama untuk diselesaikan guna mencapai tujuan optimalisasi pajak dan retribusi adalah terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, teknis pengelolaan pajak dan faktor eksternal. Selanjutnya dari permasalahan tersebut, sub kriteria yang memiliki bobot terbesar adalah perhitungan target dan potensi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang elektronifikasi, ketersediaan perda, kompetensi dan ketersediaan petugas khusus pemeriksaan dan penagihan, sosialisasi pajak di media digital, serta kondisi ekonomi.

Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan jika pemerintah Kota Bukittinggi ingin mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah. Permasalahan yang krusial adalah ketersediaan dan kompetensi petugas khusus pemeriksa dan penagihan pajak yang memadai. Sejalan dengan dengan Herfa (2016) bahwa staf pemeriksa pajang belum kompeten. Berdasarkan hasil FGD, bukittinggi hanya memiliki satu orang tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan pajak dan retribusi. Selanjutnya adalah ketersediaan infrastruktur terutama berkaitan dengan adopsi teknologi yang telah berkembang sangat pesat. Ketersediaan Infrastruktur (software, teknologi digital, jaringan internet, computer, tapping box, parkir meter) dan penganggaran untuk pengadaan Infrastruktur merupakan isu yang penting untuk diperhatikan. Hal ini sangat didukung dengan keberadaan Bukittinggi sebagai salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat. Ditambah lagi penyumbang terbesar pada PAD bukittinggi adalah dari pajak hotel dan restaurant yang merupakan sektor berkaitan dengan pariwisata.

Herfa (2016) menjelaskan sarana dan prasarana yang belum memadai merupakan masalah strategis dalam peningkatan pendapatan daerah.

Gambar 4.2. Hierarki Permasalahan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Bukittinggi



Sumber: data diolah (2021)

Tabel 4.3. Hasil Pembobotan Kriteria dan Subkriteria

Kriteria	Sub Kriteria	Score
Aspek Kelembagaan (0,56)	Sistem administrasi pajak yang jelas	0,292
	Ketegasan Pemda menindak wajib pajak yang tidak patuh	0,189
	Sosialisasi pajak secara masive dengan media digital	0,153
	Kredibilitas dan Reputasi Pemerintah Daerah	0,139
	Komitmen Pemerintah Daerah	0,137
	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pajak	0,89
Aspek Sumber Daya Manusia (0,275)	Ketersediaan Petugas khusus pemeriksa dan penagihan pajak yang memadai	0,326
	Kompetensi Petugas khusus pemeriksa dan penagihan pajak	0,293
	Insentif petugas pajak	0,276
	Komitmen petugas dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan	0,105
Aspek Infrastruktur (0,167)	Ketersediaan Infrastruktur (software, teknologi digital, jaringan internet, computer, tapping box, parkir meter)	0,357
	Jumlah Infrastruktur yang memadai (software, teknologi digital, jaringan internet, computer, tapping box, parkir meter)	0,349
	Ketersediaan Anggaran untuk pengadaan Infrastruktur	0,173
	Perawatan Infrastruktur secara berkala	0,121
	Perhitungan target dan potensi pajak	0,471
Aspek Teknis Pengelolaan Pajak (0,147)	Dasar penetapan potensi pajak	0,235
	Database objek dan wajib pajak	0,169
	Uji petik secara berkala	0,124
	Kondisi Politik	0,46
Aspek Eksternal (0,143)	Kondisi Ekonomi	0,288
	Kesadaran wajib pajak	0,162
	Pungli dan Premanisme	0,09
	Ketersediaan Kanal non tunai yang beragam	0,438
Aspek Elektronifikasi (0,107)	Komitmen bersama dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran	0,246
	Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	0,171
	Ketersediaan tenaga IT untuk mendukung penerimaan pajak non tunai	0,145
	Ketersediaan Perda	0,334
Aspek Regulasi (0,105)	Regulasi Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan	0,311
	Regulasi terkait sanksi dan penalti	0,19
	Dasar hukum pemeriksaan database wajib pajak	0,166

Sumber: data diolah (2021)

Selanjutnya akar permasalahan yang harus diselesaikan segera adalah dalam hal aspek teknis Perhitungan target dan potensi pajak, dasar penetapan potensi pajak dan database objek dan wajib pajak. Hal ini juga penting menjadi perhatian agar target yang sudah ditetapkan dapat dicapai. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak objek pajak yang belum terdata oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Sehingga penting

pemerintah kota Bukittinggi memiliki database wajib pajak. Kondisi lain dari permasalahan optimalisasi pajak dan retribusi adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Sejalan dengan Herfa (2016) kurangnya kesadaran merupakan masalah yang perlu diselesaikan dalam peningkatan penerimaan pajak. Amit Yadav et.al (2015) menemukan bahwa banyak wajib pajak yang sengaja melaporkan pajak tidak sesuai dengan pendapatan mereka.

4.3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil metode AHP ditemukan bahwa akar permasalahan dalam optimalisasi pajak dan retribusi Kota Bukittinggi adalah terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, teknis pengelolaan pajak dan faktor eksternal. Selanjutnya dari permasalahan tersebut, sub kriteria yang memiliki bobot terbesar adalah perhitungan target dan potensi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang elektronifikasi, ketersediaan perda, kompetensi dan ketersediaan petugas khusus pemeriksaan dan penagihan, sosialisasi pajak di media digital, serta kondisi ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini perlu upaya dalam menentukan strategi kebijakan yang perlu dilakukan SKPD.